

## Pemasukan dari Jalan Berbayar Bisa Sampai Rp60 Miliar per Hari

JAKARTA (IM) - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail menyebutkan, pemasukan daerah dari jalan berbayar elektronik (*electronic road pricing*/ERP) di Ibu Kota bisa mencapai Rp30 miliar-Rp60 miliar per hari. Ismail mengatakan, dari seluruh pengguna kendaraan yang melewati 25 ruas jalan ber-ERP per hari diperkirakan mendapat pemasukan Rp30 miliar.

Jika dikalikan dua alias pulang pergi dengan arus pengendaraan kendaraan sebaliknya maka pemasukannya dua kali lipat. "Kami dapat informasi, tidak kurang per hari sekitar Rp 30 miliar-Rp 60 miliar dana yang masuk. Satu trip itu Rp 30 miliar, berarti dua kali (perjalanan) sekitar Rp 60 miliar," ujar Ismail di Jakarta, kemarin.

Berdasarkan usulan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE), tarif layanan ERP dipatok Rp 5.000-Rp 19 ribu per kendaraan dengan rencana diterapkan di 25 ruas jalan di Jakarta pada

pukul 05.00-22.00 WIB.

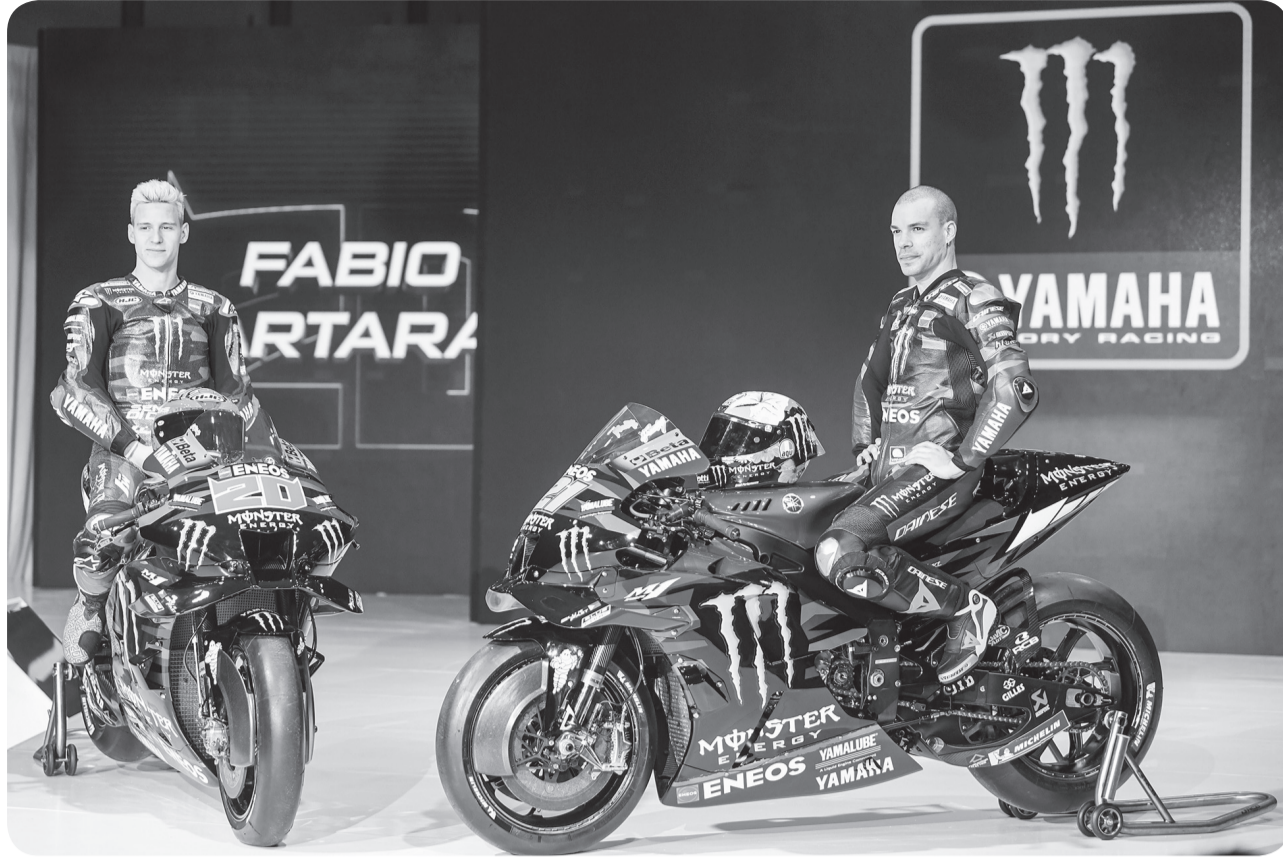
Dia menilai, jumlah pemasukan yang bakal menjadi pendapatan daerah DKI Jakarta itu tidaklah sedikit. Karena itu, penggunaan uang masuk itu harus ditangani dengan baik. "Makanya harus dipastikan dengan angka tersebut, dengan potensi penerimaan sebesar itu, harus ditangani dan diterapkan dengan baik," kata politikus PKS tersebut.

Karena pemasukan yang tergolong besar, Ismail mengaku, akan melakukan konfirmasi lanjutan kepada Dishub DKI Jakarta terkait usulan nilai tarif layanan ERP sebesar Rp 5.000-Rp 19 ribu per sekali melewati jalan. "Kami akan mempertanyakan dasarnya darimana angka itu, pasti harus ada hitung-hitungannya," tutur Ismail.

Berdasarkan data Dishub DKI, sebanyak 25 jalan di Ibu Kota akan diterapkan ERP. Sehingga kendaraan, baik roda dua dan empat yang melewati jalan itu dikenakan biaya. Langkah itu dilakukan Pemprov DKI untuk mengendalikan kemacetan. ● yan

# 4 | Metropolis

FOTO: ANT



## PELUNCURAN YAMAHA YZR M1 2023 LIVERY TERBARU

Pembalap Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo (kiri) bersama Franco Morbidelli (kanan) berpose dengan sepeda motor Yamaha YZR M1 2023 Livery Terbaru saat peluncuran di Jakarta, Selasa (17/1). Pada musim balap 2023, Monster Energy Yamaha MotoGP dengan dua pembalapnya Fabio Quartararo dan Franco Morbidelli memamerkan Yamaha YZR M1 2023 Livery Terbaru serta 'wearpack' pembalap dan seragam tim terbarunya.

## PENGHAPUSAN DANA ALKES BIKIN WARGA SENGSARA

# Anggota Dewan: Sebelum Terlambat, Bertobatlah Wahai Para Pejabat DKI

"Kelihatan sekali pejabat Pemda DKI tidak pro terhadap kesehatan masyarakat DKI Jakarta. Padahal yang kami perjuangkan ini masyarakat kecil yang memakai BPJS, bukan orang yang punya uang banyak bisa pilih rumah sakit swasta dengan tarif mahal dan tidak antre," kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco.

JAKARTA (IM) - Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta meminta pejabat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta untuk bertobat karena menghapus dana alat kesehatan (alkes) sebesar Rp 220 miliar pada tahun 2023.

Hal tersebut disampaikan lantaran Komisi E DPRD DKI Jakarta berang

g dengan langkah TAPD yang secara sepihak mengalihkan dana pengadaan alkes, karena tidak masuk dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

Anggaran itu dialihkan buntut evaluasi Kemendagri terhadap belanja tidak terduga (BTT) Pemprov DKI Jakarta tahun 2023 sebesar Rp 648,5 miliar yang dianggap tidak

sepadan dengan target belanja daerah Rp 74,3 triliun.

Kemendagri lalu merekomendasikan pemerintah daerah agar mengalokasikan kegiatan yang tidak masuk ke dalam RKPD ke dalam pagu BTT 2023.

Hasilnya, TAPD memangkas pengadaan alkes Rp 220 miliar tanpa koordinasi dengan Komisi E, sehingga BTT naik menjadi Rp 868,5 miliar.

Alhasil, Komisi E Jakarta kesal dengan langkah TAPD karena anggaran telah disepakati bersama dan persetujuan anggaran sebetulnya fungsi legislatif, bukan eksekutif.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco mengatakan, pengadaan alkes merupakan kategori darurat dan mendasak (dar-sak), meski Dinas Kesehatan

tidak memasukkannya ke dalam RKPD.

Hal ini berkaca pada laporan masyarakat dan peninjauan langsung dewan ke beberapa rumah sakit umum daerah (RSUD) milik DKI Jakarta.

"Masyarakat untuk pemeriksaan MRI (magnetic resonance imaging/ teknik pemindaian radiologi) mesti tunggu tiga bulan.

Untuk CT scan mesti tunggu tiga bulan, mau operasi juga tunggu sebulan, keburu meninggal pasiennya," ujar Baco, Selasa (17/1).

Dalam hal ini ia juga mempertanyakan hati nurani para pejabat TAPD dan Dinas Kesehatan soal keluhan masyarakat tersebut.

Apalagi sekarang masyarakat harus mengantre untuk mendapat pelayanan kesehatan (yankes) dari pemerintah daerah.

"Sekarang saja untuk mendapat ruang ICU dan NICU itu antre, inkubator juga antre. Ini, di mana hati nurani kalian melihat warga DKI Jakarta sengsara karena keterbatasan alat-alat kesehatan kita," sindirnya.

Anggota Komisi E DPRD ini lalu membandingkan dengan daerah lain di Pulau Jawa yang memiliki alat kesehatan lebih lengkap

dan canggih.

Seharusnya, kata dia, Pemerintah DKI Jakarta dapat mengungguli alkes daerah lain karena ditopang dengan anggaran paling besar di Indonesia hingga mencapai Rp 83,7 triliun pada 2023.

"Ini kelihatan sekali kalau pejabat Pemda DKI tidak pro terhadap kesehatan masyarakat DKI Jakarta. Padahal yang kami perjuangkan ini masyarakat kecil yang memakai BPJS, bukan orang yang punya uang banyak bisa pilih rumah sakit swasta dengan tarif mahal dan tidak antre," ungkap dia.

"Cepat bertobatlah para pejabat DKI, sebelum terlambat," sambung Baco.

Sekretaris DPD Golkar DKI ini juga berharap, Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyelidiki hilangnya anggaran pengadaan alkes tersebut.

Padahal, kata dia, Komisi E telah menyetujui anggaran tersebut untuk kepentingan masyarakat banyak. "Fraksi Golkar meminta Pj Gubernur DKI Jakarta mengusut dan mengevaluasi pihak-pihak yang terlibat dalam penghilangan dana alkes yang telah disahkan oleh Badan Anggaran (Banggar) dan rapat Paripurna di DPRD DKI Jakarta," pungkas Baco. ● yan



## AKSI UNJUK RASA KEPALA DESA

Massa dari Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/1). Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah dan DPR merevisi aturan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun per periode.

## Kasatpol PP DKI Minta Didirikan Kantor di Setiap Kecamatan

JAKARTA (IM) - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Arifin meminta adanya kantor khusus untuk Satpol PP di setiap Kecamatan di Jakarta. Menurutnya, perlu ada pemisahan satpol PP dengan sektor lainnya seperti Dinas Pdamad Kebakaran (Damkar).

La mengatakan, jam kerja yang tidak terbatas bagi satpol PP menjadi salah satu faktor diperlukannya kantor.

"Damkar bekerjanya kalau ada musibah kebakaran, tapi kalau pol pp bekerjanya bukan ada musibah baru dia bekerja, Pol PP tiap hari bekerja pak, tiap waktu bekerja," ujarnya di dalam Rapat Kerja Komisi A, Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat Selasa (17/1).

Ia menjelaskan, jajarannya perlu datang pagi untuk membantu ketertiban di

lokasi. Setelah bekerja, pada jam istirahat, mau tidak mau harus pulang ke kantor. Namun pas sampai, tidak memiliki kursi. "Nah itulah maknanya kemudian kami meminta kepada Badan Aset untuk sekiranya ada tempat-tempat yang bisa digunakan menjadi kantornya satpol pp kecamatan," jelasnya.

Lebih lanjut, Arifin juga mencontohkan di kawasan kota tua. Jajaran satpol PP harus menjaga kawasan Kota Tua dari pagi hingga malam hari. "Kota tua makin malam makin ramai di sekitar kali besar, mohon maaf pak, tempat untuk berteduh kami tidak ada," keluh Arifin di depan para anggota dewan.

"Kami harus pasang-pasang tenda, kadang juga dapat sponsor karena alokasi anggarannya tidak cukup. Jadi sekarang ini kita harus siapkan tenda," pungkasnya. ● yan

## Fenomena New Moon, BMKG Imbau Waspada Banjir Rob

JAKARTA (IM) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meminta masyarakat agar waspada banjir pesisir (rob) yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah pesisir Indonesia seiring fenomena fase bulan baru.

"Adanya fenomena super new moon atau fase bulan baru yang bersamaan dengan perigee (jarak terdekat bulan ke bumi) pada 21 Januari 2023 berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum," kata Kepala Pusat Meteorologi Maritim, Eko Prasetyo, di Jakarta, Selasa (17/1).

Ia mengatakan, berdasarkan pantauan data water level dan prediksi pasang surut, banjir rob berpotensi terjadi di beberapa wilayah pesisir Indonesia, diantaranya pesisir Aceh, pesisir Sumatera Utara, pesisir Sumatera Barat, pesisir Lampung, pesisir Kep Riau, pesisir Bangka Belitung,

pesisir utara DKI Jakarta.

Kondisi serupa juga berpotensi terjadi di pesisir Jawa Barat, pesisir Jawa Tengah, pesisir Jawa Timur, pesisir Bali, pesisir Nusa Tenggara Barat, pesisir Kalimantan Barat, pesisir Kalimantan Tengah, pesisir Maluku Utara, pesisir Maluku, pesisir utara Papua, dan pesisir Papua Selatan. "Potensi banjir rob ini berbeda waktu hari dan jam di tiap wilayah, secara umum berdampak pada aktivitas masyarakat di sekitar pelabuhan dan pesisir," kata Eko Prasetyo.

Ia menyampaikan, beberapa aktivitas yang terdampak yakni aktivitas bongkar muat di pelabuhan, serta aktivitas tambak garam dan perikanan darat.

"Masyarakat diimbau selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari pasang maksimum air laut serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG," tuturnya. ● yan

## Bedah Rumah Kembali Bergulir, per Rumah Dapat Rp50 Juta

JAKARTA (IM) - Pemerintah Kota Jakarta Barat atau Pemkot Jakbar membedah sedikitnya 136 rumah warga tidak layak, milik masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam program "Jumat Berfaedah" selama 2022.

"Tahun 2022 sudah 136 rumah, telah kita bongkar dan bedah. Itu adalah bedah rumah tidak layak milik warga," kata Wali Kota Jakarta Barat, Yani Wahyu Purwoko, saat dihubungi di Jakarta, Selasa, (17/1).

Yani mengatakan, kegiatan bedah rumah dalam program Jumat Berfaedah itu digelar untuk membantu warga mendapatkan hunian yang layak.

Per rumahnya, Pemkot menganggarkan biaya sebesar Rp50 juta yang bersumber

dari Baznas dan Bazis Jakarta Barat. Yani menjelaskan, sebelum membedah rumah, pihak Pemkot melakukan survei pendahuluan untuk memastikan layak atau tidak untuk diperbaiki.

Setelah itu dan dinyatakan layak untuk masuk program Bedah Rumah, maka pihaknya akan turun untuk membedah rumah. Setiap satu rumah, pihaknya membutuhkan waktu kurang lebih satu bulan untuk membongkar dan memperbaiki ulang.

Yani memastikan program Jumat Berfaedah itu akan kembali bergulir tahun ini, hanya saja dia belum bisa memastikan berapa jumlah rumah yang akan dibedah tahun ini.

Dia hanya memastikan dalam program Jumat Berfaedah nanti pihaknya ti-

dak hanya akan membangun rumah, melainkan juga tangki septik komunal gratis.

"Kita juga bangun tangki septik agar warga tidak buang kotoran sembarangan, lingkungan bersih dan terhindar dari potensi 'stunting' (tengkes)," jelas dia.

Yani pun belum bisa membeberkan jumlah tangki septik yang akan dibangun berikut biaya yang akan dikeluarkan dalam program tersebut. Untuk diketahui, Jumat Berfaedah merupakan kegiatan Pemkot Jakbar dalam membedah rumah warga tak layak dan meresmikannya setelah selesai setiap Jumat.

Tidak hanya itu, dalam program tersebut Pemkot juga kerap membagikan paket sayuran kepada warga serta memberikan kursi roda kepada warga disabilitas. ● yan



## PENDIDIKAN ANTI KORUPSI BAGI SISWA

Sejumlah siswa SD mengunjungi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Selasa (17/1). Kunjungan itu bertujuan untuk mengenalkan bahaya korupsi serta membangun budaya anti korupsi kepada para siswa.

## Kesiapan Kelenteng Hok Lay Kiong Bekasi Sambut Hari Raya Imlek

BEKASI (IM) - Kelenteng Hok Lay Kiong yang berlokasi di Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, mulai melakukan persiapan jelang Imlek tahun 2023 yang akan dilaksanakan akhir pekan nanti di tahun Kelinci Air.

Ketua Yayasan Kelenteng Hok Lay Kiong, Ronny Hermawan menuturkan pihaknya telah melakukan persiapan di antaranya bersih-bersih kelenteng.

"Jadi seperti biasa kita melaksanakan persiapan persiapan hari raya Imlek. Tapi untuk tahun ini agak berbeda ya karena dua tahun kemarin kita tidak mengadakan perayaan imlek di kelenteng karena pandemi Covid-19," ujar Ronny Hermawan, Selasa (17/1).

Bahkan pada Minggu (15/1) lalu, altar serta patung dewa di dalam kelenteng itu dibersihkan oleh umat yang datang dengan cara gotong royong.

Kemudian, persiapan itu pun dilakukan dengan memasang lampion yang merupakan sumbangan dari umat.

Pihaknya juga menerima sumbangan lilin yang akan dipasangkan sebagai sarana ibadah umat yang datang. Saat pemerintah pusat telah mencabut PPKM beberapa waktu lalu, Ronny Hermawan pun optimis pelaksanaan ibadah

Imlek akan jauh lebih khidmat.

"Saya yakin imlek nanti akan lebih meriah lebih bersuka cita, bahagia namun tidak persiapkan jelang Imlek tahun 2023 yang akan dilaksanakan akhir pekan nanti di tahun Kelinci Air."

Adapun nantinya ratusan lampion terpasang di kelenteng Hok Lay Kiong. Pada Sabtu, 21 Januari dirinya memprediksi ribuan umat akan beribadah datang ke kelenteng Hok Lay Kiong.

"Umat yang datang ribuan. Karena kita buka dari pagi sampai jam 12 malam. Maka nggak akan ada kerumunan karena waktunya panjang dan datangnya bergulir. Tapi yang sudah sudah ada 3.000 orang yang datang ke sini," pungkasnya. ● yan

## PENGUMUMAN

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa PT. IBIBO GROUP INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Selatan (Perseroan) akan meningkatkan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dan penyetoran atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan cara mengkonversi hutang Perseroan kepada pemegang saham.

Ketentuan ini dibuat guna memenuhi Ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang dapat di Kompensasikan Sebagai Setoran Saham.

Jakarta, 18 Januari 2023  
Direksi  
PT. IBIBO GROUP INDONESIA